

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan memerlukan suatu sistem pengendalian *intern* yang dapat membantu perusahaan dalam mengamankan aset yang dimilikinya. Suatu pengendalian *intern* dapat meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan dan digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Pengendalian *intern* merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh pemilik perusahaan, manajemen, dan seluruh karyawan, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal seperti keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi.

Sistem otorisasi transaksi berpengaruh terhadap pengendalian *intern* karena kegiatan ini memberikan verifikasi dan persetujuan tambahan terhadap transaksi keuangan sehingga mengurangi kemungkinan kecurangan. Pengendalian *intern* melalui sistem otorisasi transaksi pada perusahaan dapat dicapai antara lain dengan melakukan pemisahan fungsi bagian-bagian yang terkait dalam perusahaan, prosedur pemberian wewenang, prosedur dokumentasi, prosedur dan catatan akuntansi, pengawasan fisik serta adanya pemeriksaan *intern* secara bebas. Tujuan utama pemisahan fungsi adalah untuk menghindari dan pengawasan segera atas kesalahan atau ketidakberesan. Adanya pemisahan fungsi

adalah agar dapat dicapai suatu efisiensi pelaksanaan tugas. Prosedur pemisahan wewenang bertujuan untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisir oleh orang yang berwenang.

Lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap pengendalian *intern* perusahaan karena perusahaan perlu menciptakan keadaan yang mendukung pengendalian *intern* itu sendiri seperti pembuatan dokumen dan prosedur yang mempersulit dilakukannya kecurangan. Dokumentasi yang layak penting untuk menciptakan sistem pengendalian akuntansi yang efektif. Dokumentasi memberi dasar penetapan tanggung jawab untuk pelaksanaan dan pencatatan akuntansi. Selain itu, diperlukan catatan akuntansi agar dapat disiapkan catatan-catatan akuntansi yang teliti secara cepat dan data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu. Walaupun demikian, prosedur pengawasan fisik tetap harus dilakukan seperti melakukan *cash count*, *stock opname* dan kegiatan pengawasan lainnya.

PT Damai Abadi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan distribusi aluminium. Perusahaan ini beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 152 Medan. Lokasi pabrik terletak di Jl. Sei Mencirim, Desa Payageli, Deli Serdang. Persediaan merupakan aset perusahaan yang rentan akan kerusakan, pencurian dan penurunan nilai pasar sehingga harus dilakukan pengawasan persediaan karena kelalaian dalam pengelolaan persediaan dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Pada PT Damai Abadi terdapat tiga jenis persediaan yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi. Fenomena yang terjadi di perusahaan adalah lemahnya sistem pengendalian

intern persediaan sehingga sering menyebabkan terjadinya selisih pencatatan persediaan antara bagian gudang dengan bagian akuntansi perusahaan. Beberapa hal yang menyebabkan seringnya terjadi selisih persediaan adalah karena adanya penggunaan bahan baku yang tidak dibuat buktinya oleh bagian produksi sehingga laporan pemakaian yang diberikan kepada bagian akuntansi perusahaan menjadi tidak lengkap. Selain itu, sering juga terjadi pengiriman barang yang tidak sesuai dengan *delivery order*, sehingga terjadi retur dari pembeli. Retur dari pembeli yang terlambat dilaporkan kepada bagian akuntansi perusahaan menyebabkan catatan akuntansi menjadi berbeda dengan catatan gudang. Pihak gudang juga seringkali tidak melaporkan adanya barang cacat. Laporan atas barang cacat baru diberitahukan bagian gudang dan dibuat berita acaranya pada saat bagian akuntansi perusahaan mempertanyakan selisih pencatatan persediaan.

Salah satu penyebab lemahnya pengendalian *intern* persediaan perusahaan adalah sistem otorisasi transaksi keuangan. Pada perusahaan sudah ada sistem otorisasi pada saat mengirimkan persediaan barang jadi sesuai *delivery order* dari kantor. Bagian penjualan di perusahaan mencetak *delivery order* sesuai pesanan pembeli kemudian mengirimkan ke bagian gudang. Bagian gudang yang menerima *delivery order* kemudian melakukan persiapan pengiriman barang, memberikannya kepada kepala gudang untuk verifikasi dan otorisasi sebelum akhirnya dikirimkan kepada pembeli. Pada saat terjadi retur barang dari pembeli, bagian gudang akan terlebih dahulu menerima retur barang. Pada keadaan ini tidak ada otorisasi transaksi yang terjadi. Bagian gudang kemudian akan membuat memo retur barang dan melaporkan kepada kepala gudang untuk diverifikasi.

Masalah yang terjadi di perusahaan adalah seringnya retur barang tidak dibuat memo retur barang segera setelah terjadi retur barang, sehingga seringkali terjadi kesalahan pengakuan retur barang dan baru ketahuan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap *delivery order* yang sudah dilakukan.

Masalah lain dalam sistem otorisasi transaksi adalah kurangnya otorisasi pada saat pengambilan barang dari gudang bahan baku, karena pengambilan bahan baku sering kali dilakukan oleh bagian produksi tanpa membuat memo pengambilan barang dengan alasan *urgent* sehingga pengambilan dilakukan terlebih dahulu dan kemudian membuat bukti pengambilan menyusul. Keadaan ini sering menyebabkan terjadinya selisih persediaan bahan baku karena karyawan lupa dengan bahan yang sudah diambilnya.

Hal lain yang menyebabkan lemahnya sistem pengendalian *intern* perusahaan adalah lingkungan pengendalian. Pada perusahaan belum ada pembagian tugas yang jelas, di mana karyawan yang bertugas dalam melakukan pencatatan terhadap barang di gudang tidak dipisahkan dengan karyawan yang bertugas dalam melakukan pengeluaran barang dari gudang. Perusahaan juga tidak mempunyai komite audit yang dapat membantu perusahaan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya sistem operasional prosedur perusahaan dan pengawasan terhadap fisik persediaan. Pada perusahaan, seringkali sistem operasional prosedur yang sudah ditetapkan tidak dijalankan dengan benar oleh karyawan. Misalnya saja, pada sistem operasional prosedur ditetapkan bahwa pengambilan bahan baku di gudang hanya boleh dilakukan oleh bagian gudang setelah menerima memo pengambilan bahan baku, akan tetapi kenyataannya

seringkali bahan baku terlebih dahulu diambil sebelum memo dibuat. Selain itu, pada sistem operasional juga dilakukan pembatasan bahwa hanya karyawan gudang yang boleh keluar masuk gudang, tetapi kenyataannya bagian produksi pun boleh masuk langsung ke dalam gudang untuk melakukan pengambilan barang.

Fenomena pengendalian *intern* yang terjadi pada PT Damai Abadi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Fenomena Pengendalian *Intern*

Indikator Variabel (Y)	Realita	Standar
Struktur organisasi	Struktur organisasi di perusahaan tidak memisahkan antara karyawan yang bertanggung jawab atas persediaan bahan baku dan persediaan barang jadi.	Setiap karyawan di perusahaan harus bertanggung jawab atas satu bagian tertentu saja sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.
Prosedur catatan akuntansi	Sering terjadi keterlambatan pencatatan akuntansi karena data dari gudang tidak lengkap dan terlambat dikirimkan.	Seluruh transaksi keuangan harus mempunyai bukti transaksi dan dibukukan secara tepat waktu.
Praktik yang sehat	Perusahaan tidak mempunyai bagian audit internal.	Perusahaan harus mempunyai bagian audit internal untuk melakukan pengawasan terhadap prosedur perusahaan.
Karyawan yang kompeten	Perusahaan tidak mempunyai standar penerimaan karyawan.	Perusahaan harus menetapkan standar penerimaan karyawan dengan kualifikasi sesuai bagian yang diperlukan.

Sumber: Hasil Olah Data, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masalah pengendalian *intern* yang terjadi di perusahaan antara lain kurangnya pemisahan tugas dan

tanggung jawab. Hal ini disebabkan karena manajemen perusahaan merasa bahwa pemisahan tugas yang terlalu luas menyebabkan perusahaan memerlukan biaya yang lebih besar karena semakin banyak karyawan yang harus dilibatkan dalam kegiatan usahanya walaupun secara sistem pengendalian *intern*, hal tersebut mutlak diperlukan.

Data transaksi keuangan seringkali ditahan di bagian gudang karena lupa ataupun belum lengkap karena dibuat menyusul, sehingga pencatatan akuntansi menjadi tidak akurat karena tidak didukung dengan data yang tepat waktu. Seringkali data transaksi keuangan yang berkaitan dengan persediaan baru dikirimkan kepada bagian akuntansi setelah laporan keuangan sudah diterbitkan. Akibatnya laporan keuangan yang diterbitkan menjadi tidak akurat. Pelaporan atas data transaksi keuangan yang terlambat dikirimkan baru dilakukan revisi pada laporan keuangan periode berikutnya, sehingga informasi yang disampaikan pada laporan keuangan menjadi tidak *up to date*.

Selain itu, perusahaan tidak mempunyai komite audit sebagai bagian dari syarat penciptaan pengendalian *intern* yang baik. Akibatnya perusahaan lebih banyak mengharapkan karyawan sendiri saling *cross-check*. Pemeriksaan yang dilakukan karyawan yang terlibat dalam transaksi keuangan akan kurang efektif jika dibandingkan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh karyawan yang tidak terlibat dalam transaksi keuangan atau bagian komite audit. Hal ini disebabkan karena orang yang mempunyai hubungan dengan transaksi keuangan mempunyai konflik kepentingan sehingga dikhawatirkan tidak dapat melakukan pemeriksaan secara independen.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul penelitian **“PENGARUH SISTEM OTORISASI TRANSAKSI KEUANGAN DAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN TERHADAP PENGENDALIAN *INTERN* PERSEDIAAN PADA PT DAMAI ABADI”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Disinyalir pengendalian *intern* mengalami penurunan disebabkan karena sistem otorisasi transaksi keuangan yang lemah.
2. Disinyalir pengendalian *intern* mengalami penurunan disebabkan lingkungan pengendalian yang kurang mendukung.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengendalian *intern*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem otorisasi transaksi keuangan dan lingkungan pengendalian.
2. Sistem otorisasi transaksi, lingkungan pengendalian dan pengendalian *intern* hanya membahas tentang objek persediaan.
3. Penelitian dilakukan di PT Damai Abadi yang beralamat di Jl. Sei Mencirim Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem otorisasi transaksi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengendalian *intern* perusahaan PT Damai Abadi?
2. Apakah lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap pengendalian *intern* perusahaan PT Damai Abadi?
3. Apakah sistem otorisasi transaksi keuangan dan lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap pengendalian *intern* perusahaan PT Damai Abadi?

1.5 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah sistem otorisasi transaksi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengendalian *intern* perusahaan PT Damai Abadi.
2. Untuk mengetahui apakah lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap pengendalian *intern* perusahaan PT Damai Abadi.
3. Untuk mengetahui apakah sistem otorisasi transaksi keuangan dan lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap pengendalian *intern* perusahaan PT Damai Abadi.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang bersangkutan dalam hal yang berkaitan dengan pengendalian *intern* persediaan.

2. Bagi Civitas Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan informasi bagi mahasiswa yang akan mengambil penelitian dengan topik sejenis untuk dapat dikembangkan secara lebih luas oleh akademis, sehingga dapat memperluas ilmu.